

Pengaruh PKB, BBNKB, Dan PBBKB Terhadap PAD (Studi pada Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 – 2019)

Epan Saputra¹, Narti Eka Putri²

Universitas Tanri Abeng^{1,2}

Jl. Swadarma Raya No. 52, Ulujami, Pesangrahan, Jakarta Selatan

E-mail : epan.saputra@tau.ac.id¹, narti.putri@tau.ac.id²

ABSTRAK

Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan dan pembangunan untuk pemerataan ekonomi masyarakat. Variabel yang akan diteliti yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dilakukan karena objek penelitian yang semakin meningkat dan menjadi kebutuhan yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari dalam melakukan aktivitasnya. Populasi dari penelitian kuantitatif ini berupa data pajak kendaraan bermotor, data bea balik nama kendaraan bermotor, data pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan data penerimaan pendapatan asli daerah Bangka Belitung dan untuk menentukan sampelnya peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan secara simultan juga berpengaruh secara positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : PKB, BBNKB, PBBKB, PAD, Bangka Belitung

ABSTRACT

Taxes are a tool for the government to finance routine government expenditures in carrying out implementation and development for economic equality in society. The variables to be studied are motor vehicle tax, motor vehicle name transfer fee and motor vehicle fuel tax, this is done because the object of research is increasing and it becomes a necessity used by everyday people in carrying out their activities. The population of this quantitative research is motor vehicle tax data, motor vehicle name transfer fee data, motor vehicle fuel tax data and Bangka Belitung regional revenue revenue data and to determine the sample, the researcher uses purposive sampling technique. The results of this study indicate that partially motor vehicle tax, motor vehicle name transfer fee, and motor vehicle fuel tax have a significant positive effect on local revenue, and simultaneously also have a significant positive effect on local revenue.

Keywords:: PKB, BBNKB, PBBKB, PAD, Bangka Belitung

I. PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000. Pemekaran ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Sejalan dengan reformasi penyelenggaraan pemerintahan, maka sistem pemerintahan di daerah di ubah dari UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah dalam hal ini adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan bertanggung jawab atas daerahnya sendiri dan diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber penerimaan dana pemerintah adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Menurut (Saepurrahman 2012) dalam Budi Kusuma Wijaya *et.al.*, (2016), dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Dari banyak komponen pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, yang menarik untuk diteliti adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Hal ini Karena objek penelitian yang jelas dapat terlihat yaitu padatnya lalu lintas yang dipenuhi oleh kendaraan yang ada dijalanan membuat peneliti tertarik untuk melihat, apakah salah satu objek pajak dalam hal ini kendaraan bermotor, mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Bangka Belitung tahun 2012 – 2018 Untuk Roda 2 (R2) dan Roda 4 (R4)

Wilayah Samsat	2016		2017		2018	
	R2	R4	R2	R4	R2	R4
Bangka	138.598	16.923	146.930	17.661	156.365	18.958
Bangka Tengah	87.704	9.913	94.093	10.190	100.524	10.797
Bangka Selatan	90.118	6.790	97.159	6.976	104.890	7.438
Bangka Barat	111.312	8.814	119.214	9.109	126.809	9.629
Pangkalpinang	130.843	23.514	138.290	24.644	145.954	26.110
Belitung	106.405	13.039	112.774	14.122	120.311	15.461
Belitung Timur	69.974	5.962	74.979	6.427	81.415	7.110
Total	734.954	84.955	783.439	89.129	836.268	95.503
	819.909		872.568		931.771	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah Apakah ada pengaruh secara signifikan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea Balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2009-2018?

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Untuk konsep efektivitas yang dikaitkan dengan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan

atas pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dalam mencapai target yang sudah ditentukan.

Jadi untuk mengetahui nilai efektivitas pajak daerah, maka peneliti menggunakan rumus yang telah digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan Vita Amaliah Hakim (2013), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak}}{\text{Nilai Target Pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, maka untuk mengukur tingkat efektivitas dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup efektif
60 – 80 %	Kurang efektif
< 60 %	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Vita Amaliah Hakim, 2013)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 Bab 1 Pasal butir 9 dan 10 mengatakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan

Bermotor. Sementara untuk subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, sedangkan yang menjadi subjeknya adalah yang dapat menerima penyerahan

kendaraan bermotor. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Orang pribadi dan Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 Bab 1 Pasal butir 13 dan 14 mengatakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air, sedangkan yang menjadi Subjek Pajaknya adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Orang pribadi dan Badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, sementara penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan untuk Tarif ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16 tentang pelaksanaan otonomi daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18

menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017, Jenis-jenis bagian pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut;

1. Pajak Daerah
 - II. Pajak kendaraan bermotor;
 - III. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor;
 - IV. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - V. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
2. Retribusi daerah
 - I. Retribusi jasa umum;
 - II. Retribusi jasa usaha
 - III. Retribusi perizinan tertentu
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Perumusan Hipotesis

Pembangunan serta pelayanan yang ada dalam suatu daerah merupakan hasil dari kontribusi pajak yang ada disuatu daerah yang mana sudah diatur dalam perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah. Salah satu kontribusi pajak daerah ialah pajak kendaraan bermotor (PKB), Dimana menurut Budi Kusuma Wijaya *et.al.*, (2016) bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Semakin meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor akan meningkatkan pendapatan daerah, termasuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan ketika terjadi transaksi atas penyerahan kendaraan bermotor akan dikenakan pajak daerah dimana sudah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini di dukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Zulkifli (2015), dia mengatakan bahwa bea balik

nama kendaraan bermotor memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

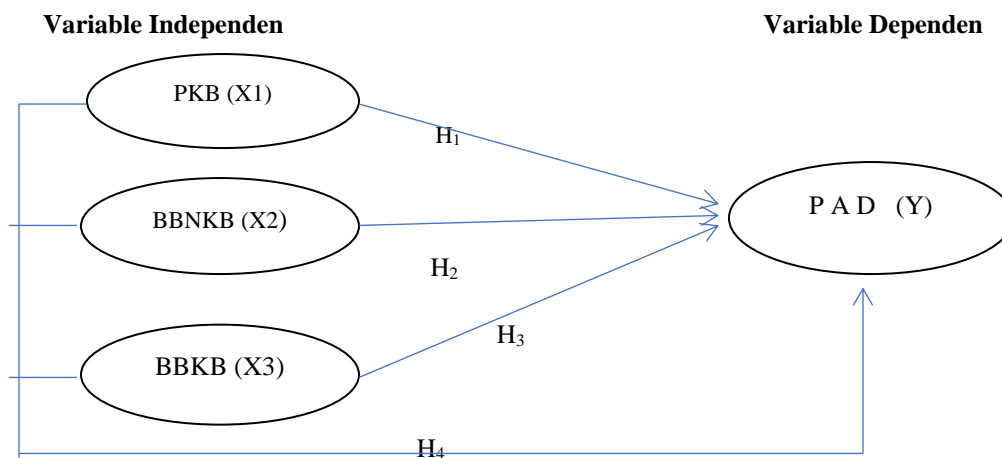
H2: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kendaraan adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk memudahkan dalam menempuh suatu tempat ke tempat lain. Namun perjalanan yang ditempuh dengan menggunakan kendaraan membutuhkan bahan bakar agar kendaraan tersebut bisa berfungsi. Oleh karena itu semakin banyak kendaraan yang ada maka semakin meningkat pula masyarakat melakukan pengisian bahan bakar kendaraannya dan semakin banyak pula pemasukan pendapatan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Budi Kusuma Wijaya *et.al.*, (2016), bahwa pajak bahan bakar kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendatang asli daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H3: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan yang dioperasikan didarat maupun di air yang atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Namun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan suatu kegiatan penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Sedangkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak atas penggunaan/pembelian untuk bahan bakar kendaraan yang digunakan. Jadi dapat dikatakan bahwa ketiga variabel ini merupakan variabel yang saling keterkaitan. Hal ini dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Budi Kusuma Wijaya, *et.al* (2016) mengatakan bahwa secara simultan ketiga variabel ini berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah



Gambar 1
Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pajak kendaraan bermotor (X1), bea balik nama kendaraan bermotor (X2), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (X3). Kemudian

dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah pendapatan asli daerah (Y). Berikut di bawah ini adalah indikator masing masing variabel:

Tabel 4
Variabel Dan Indikator

Variabel Independen (X1)	Indikator	Kode
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Realisasi pajak kendaraan bermotor bulan januari sampai bulan maret tahun 2009.	RKPB 0109 - 0309
	Realisasi pajak kendaraan bermotor bulan
	Realisasi pajak kendaraan bermotor bulan juli sampai bulan september 2018	RPKB 0718 - 0918
	Realisasi pajak kendaraan bermotor bulan oktober sampai bulan desember tahun 2018.	RPKB 0918 - 1218
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor bulan januari sampai bulan maret tahun 2009.	RBBNKB 0109 - 0309
	Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor bulan.....
	Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor bulan oktober sampai bulan desember tahun 2018.	RBBNKB 1018 - 1218
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB)	Realisasi bahan bakar kendaraan bermotor bulan januari sampai bulan maret tahun 2009.	RBBNKB 0109 - 0309
	Realisasi bahan bakar kendaraan bermotor bulan
	Realisasi bahan bakar kendaraan bermotor bulan oktober sampai bulan desember tahun 2018.	RBBNKB 1018 - 1218
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi pendapatan asli daerah tahun bulan januari sampai bulan maret tahun 2009.	RPAD 0109 - 0309
	Realisasi pendapatan asli daerah tahun bulan
	Realisasi pendapatan asli daerah daerah bulan oktober sampai bulan desember tahun 2018.	RPAD 1018 - 1218

Populasi dalam penelitian ini adalah data pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB) dan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bangka Belitung tahun 2009 – 2018. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hal ini dilakukan agar memperoleh sampel yang *representative* dengan kriteria sampel yang digunakan adalah nilai realisasi pajak kendaraan bermotor, nilai realisasi bea balik nama kendaraan bermotor, nilai realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan nilai realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Bangka Belitung tahun 2009 – 2018, yang

kemudian dijabarkan dalam perhitungan setiap bulannya lalu kemudian dibagi menjadi triwulan dan data triwulan ini dijumlahkan lalu dibagi tiga sehingga dapat data untuk penelitian dan memperoleh 40 sampel. Sehingga nilai realisasi dari masing-masing variabel, baik variabel independen dalam hal ini pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah terdiri dari 40 sampel.

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah merupakan data kuantitatif, sementara sumber data yang digunakan adalah data sekunder,

dalam hal ini didapat dari Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Provinsi Bangka Belitung yang beralamat di jalan. Pulau Belitung No.4 Komplek Perkantoran Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Untuk metode pengumpulan data yaitu dengan studi dokumentasi.

Dalam penelitian ini menggunakan program spss ver. 22.0 dengan pengujian metode one sample *kolmogorov smirnov* dengan tingkat spesifikasi atau *level signifcation* (α) sebesar 0,05%. Dasar pengambilan keputusan penerimaan dan penolakan, jika nilai probabilitas */p-value* pada kolom *Asymp.sig.(2-tailed)* $>$ *level of significance* (α) (0,05) dan H_0 ditolak jika nilai probabilitas *p-value* pada kolom *Asymp.sig.(2- tailed)* \leq *level of significance* (α) (0,05). Berikut tabel hasil uji dibawah ini:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000050
	Std. Deviation	2955547810,55488000
Most Extreme Differences	Absolute	,103
	Positive	,097
	Negative	-,103
Test Statistic		,103
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Hasil SPSS ver. 22

Dari hasil uji normalitas diatas nilai pada kolom *Asymp.sig.(2-tailed)* \geq *level of significance* (α) (0,05) yaitu sebesar (0.200 $<$ 0,05) maka dapat dikatakan data diatas terdistribusi secara normal. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel *normal p-p plot regression*

standardized residual yang menunjukan titik-titik *residual* mendekati garis lurus sehingga dapat dikatakan data yang saya miliki ini benar-benar normal.

Tabel 6
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3329160803,510	1762405215,969		-1,889	,067		
Pkb	1,907	,257	,504	7,405	,000	,250	4,004
bbnkb	,417	,161	,118	2,593	,014	,558	1,793
bbkb	1,510	,264	,427	5,713	,000	,207	4,831

a. Dependent Variable: pad

Sumber : Data Hasil SPSS ver. 22

Dari hasil uji multikolinearitas di atas yang < 10 , maka dapat dikatakan bahwa data di atas tidak terdapat pada kolom *tolerance* $> 10\%$ (0,1) dan nilai VIF terjadi multikonearitas.

Tabel 7
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,979 ^a	,958	,955	3076231693,51434	1,818

a. Predictors: (Constant), bbkb, bbnkb, pkb

b. Dependent Variable: pad

Sumber : Data Hasil SPSS ver. 22

Dari hasil uji autokorelasi di atas didapatkan nilai $n = 40$, $du = 1.3384$ dan $dw = 1,818$ dengan kata lain $dw \geq du$ atau d lebih besar dari dL atau lebih kecil

dari (4-dL), sehingga dapat dikatakan dari data tersebut tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 8
Hasil Uji t (Uji Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3329160803,510	1762405215,969		-1,889	,067
PKB	1,907	,257	,504	7,405	,000
BBNKB	,417	,161	,118	2,593	,014
BBKB	1,510	,264	,427	5,713	,000

Sumber : Data Hasil SPSS ver. 22

- Hipotesis 1**

Dari hasil tabel diatas nilai pada kolom signifikan PKB lebih kecil dari nilai signifikan 0.05 yaitu ($0.000 < 0.005$) yang

berarti PKB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

- Hipotesis 2**

Dari hasil tabel diatas nilai pada kolom signifikan BBNKB lebih kecil dari nilai signifikan 0.05 yaitu ($0.014 < 0.005$) yang berarti BBNKB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

Dari hasil tabel diatas nilai pada kolom signifikan PBBKB lebih kecil dari nilai signifikan 0.05 yaitu ($0.000 < 0.005$) yang berarti PBBKB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

- **Hipotesis 3**

Tabel 9
Hasil Uji f (Uji Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7839284569281890000,000	3	2613094856427300000,000	276,132	.000 ^b
Residual	340675251558555000,000	36	94632014321820800,000		
Total	8179959820840450000,000	39			

a. Dependent Variable: pad

b. Predictors: (Constant), bbkb, bbnkb, pkb

Sumber : Data Hasil SPSS 22.0

Dari hasil tabel uji f (uji simultan) diatas nilai pada kolom signifikan lebih kecil dari 0.05 yaitu ($0.000 < 0.005$) yang berarti secara simultan ketiga variabel

independen tersebut mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 ^a	.958	.955	3076231693,51434	1,818

a. Predictors: (Constant), bbkb, bbnkb, pkb

b. Dependent Variable: pad

Sumber : Data Hasil SPSS 22.0

Pada tabel diatas diperoleh hasil uji koefisien determinasi atau R square sebesar 0,958 yang artinya ada 95,8% variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh variabel independen (X), sedangkan sisanya

dipengaruhi oleh variabel diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 11
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.329.160.803,510	1762405215,969		-1,889	,067
PKB	1,907	,257	,504	7,405	,000
BBNKB	,417	,161	,118	2,593	,014
BBKB	1,510	,264	,427	5,713	,000

Sumber : Data Hasil SPSS ver. 22

Berdasarkan hasil pada table di atas, maka model regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y : - 3.329.160.803,510 + 1,907 X_1 + 0,417 X_2 + 1,510 X_3 + e$$

Dari regresi linear berganda diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta sebesar - 3.329.160.803,510, artinya apabila nilai X_1 , X_2 dan X_3 dalam hal ini PKB, BBNKB dan PBBKB adalah nol atau tidak ada penerimaan atau pemasukan terhadap PAD dalam hal ini berupa variabel dependen yaitu Y, maka nilai Y akan berkurang sebesar - 329.160.803,510. Hal ini disebabkan karena penerimaan terbesar pajak daerah provinsi Bangka Belitung berasal dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sehingga apabila ketiga komponen penerimaan pajak daerah tersebut tidak ada, maka akan mengakibatkan defisit penerimaan pemerintah daerah, karena sumber penerimaan untuk pengalokasian pembangun infrastruktur, pengembangan perekonomian daerah serta mensejahterakan masyarakatnya akan terhambat hal ini di ungkapkan oleh (kepala Sub Bidang Teknis Pajak Sengketa Pajak dan Doleansi Bidang Pajak pada Dinas BAKUDA Provinsi Bangka Belitung oleh Bpk. Sjamsul Bahri SH.,M.AP)
- 2) Nilai koefisien regresi variabel PKB bernilai positif yaitu sebesar 1,907 yang artinya setiap penambahan 1% nilai PKB maka akan menaikkan nilai PAD sebesar 1,907%;
- 3) Nilai koefisien regresi variabel BBNKB bernilai positif yaitu sebesar 0,417 yang artinya setiap penambahan 1% nilai bbnkb maka akan menaikkan nilai pad sebesar 0,417%;
- 4) Nilai koefisien regresi variabel pkb (X_1) bernilai positif yaitu sebesar 1,510 yang artinya

setiap penambahan 1% nilai bbkb maka akan menaikkan nilai pad sebesar 1,510%.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) PKB berpengaruh secara positif signifikan terhadap PAD. Hasil pengujian ini menyatakan tingkat signifikan yang tinggi karena semakin kecil tingkat signifikansi maka semakin kecil pula kesalahan dari hasil pengujian yang dilakukan sehingga semakin tinggi tingkat keyakinan terhadap hasil pengujian.
- 2) BBNKB berpengaruh secara positif signifikan terhadap PAD. Hasil pengujian ini menyatakan tingkat signifikan yang tinggi karena semakin kecil tingkat signifikansi maka semakin kecil pula kesalahan dari hasil pengujian yang dilakukan sehingga semakin tinggi tingkat keyakinan terhadap hasil pengujian.
- 3) PBBKB berpengaruh secara positif signifikan terhadap PAD. Hasil pengujian ini menyatakan tingkat signifikan yang tinggi karena semakin kecil tingkat signifikansi maka semakin kecil pula kesalahan dari hasil pengujian yang dilakukan sehingga semakin tinggi tingkat keyakinan terhadap hasil pengujian.
- 4) Secara simultan pengaruh PKB BBNKB, dan PBBKB terhadap PAD memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 yaitu ($0.000 < 0.005$) yang berarti secara simultan ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh secara positif signifikan terhadap PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Asteria, Beta (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Aslis Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012. *Jurnal Riset Manajemen Vol.2 No. 1, Januari 2015, 51-61.*
- Budi, Kusuma Wijaya, *et.,al.* (2016). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

- Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2014. *Journal of Accounting*, volume 2 No.2 Maret 2016.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Diah Elvina. (2017). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2016. *Skripsi Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Fayruz. (2014). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 - 2013. *Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Handaru Purnandika. (2005). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Istimewa Yogyakarta Tahun 1998 - 2003. *Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*.
- Linda Widhiyanti. (2018). Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2017 Menurut Perspektif Islam. *Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Margaretha Anggraini, *et., al.* (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 - 2014. *Jurnal Akuntansi*.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perauran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Ruslinda, Agustina, *et., al.* (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 – 2012. *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.8 No.1 Maret 2015.
- Septiani Hanipah, *et., al.* (2015). Pengaruh Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2009 – 2013. *e-Proceeding of Management* : Vol.2, No.3 Desember 2015 I Page 3274.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&F*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Zainal, Ruma, *et., al.* (2013). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar Tahun 2005 – 2009. *Jurnal Economix* Vol. 1 No. 1 Juni 2013.